

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur dan mengurus segala kegiatan jasa angkutan kereta api di Indonesia (Kereta Api Indonesia, 2021). Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pengeluaran atau pembiayaan untuk kebutuhan perusahaan yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya. Hal ini juga membutuhkan pengelolaan manajemen keuangan perusahaan yang baik dan tepat. Menurut Sutrisno (2012 : 3), manajemen keuangan atau yang sering disebut dengan pembelanjaan merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha dalam penggunaan dan pengelolaan dana secara efisien untuk mencapai sasaran perusahaan.

Unit Keuangan berperan dalam pengelolaan dan pengesahan pengeluaran biaya pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Perusahaan perlu menyesuaikan anggaran dalam memenuhi kebutuhan penunjang perusahaan baik secara rutin maupun yang bersifat khusus. Menurut Nafarin (2013 : 11), anggaran merupakan rencana kegiatan perusahaan secara kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa dalam periode tertentu. Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan disusun secara rinci sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Dalam praktiknya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) merumuskan kebijakan pengeluaran keuangan menggunakan dana resmi dan sah untuk membiayai

pengeluaran perusahaan yang disebut dengan Uang Muka Dinas (UMD). Hal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan penunjang perusahaan terutama kebutuhan pada masing-masing unit atau bagian pada upaya pencapaian sasaran.

Dalam Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KF.101/III/1/KA-2019 Tentang Uang Muka Dinas, dijelaskan bahwa terdapat dua macam Uang Muka Dinas yakni Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS). Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran kerumahtanggaan perusahaan yang bersifat rutin dan nilainya relatif kecil. Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan yang nilainya relatif besar dan bersifat perlu atau harus dibayarkan terlebih dahulu.

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) diperlukan prosedur atau pedoman kerja yang terstruktur dan sistematis. Menurut Mulyadi (2013 : 5), prosedur merupakan urutan kegiatan pekerjaan yang rutin dilakukan di suatu bagian dalam menangani transaksi perusahaan dan dilakukan berulang-ulang. Prosedur kerja memiliki peranan penting bagi perusahaan yakni dapat memberikan pedoman kerja yang jelas dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan.

Pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) ini hanya ada proses pertanggungjawaban, karena pencairan dana dilakukan setiap bulan kepada penerima dana sehingga tidak ada proses pengajuan dana. Pelaksanaan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) dimulai dari proses permohonan dana hingga pertanggungjawaban dana. Pemegang UMDT dan Pemohon UMDS wajib

mempertanggungjawabkan terkait penggunaan dana. Proses tersebut menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka yang bersangkutan memperoleh teguran dari Unit Keuangan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) tidak terlepas dari kendala yang dapat menghambat kelancaran proses tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada saat pengajuan dan pertanggungjawaban UMDT diantaranya, Pemegang UMDT yang mutasi setelah penggunaan dana dan belum terdapat pengganti, kesalahan dan ketidaksesuaian bukti transaksi pertanggungjawaban yang tidak dapat direvisi pada *e-office* sehingga terdapat pengenaan sanksi. Kendala pada permohonan dan pertanggungjawaban UMDS yakni ketidaksesuaian dokumen pada pertanggungjawaban UMDS, dana Unit Pemohon tidak terdapat sisa/habis sehingga dapat menghambat proses rencana pelaksanaan UMDS. Pengenaan sanksi juga berlaku apabila unit melakukan kesalahan dan tidak melakukan pertanggungjawaban dana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai “Analisis Prosedur Pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap dan Sementara Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya?
- 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya?
- 3) Bagaimana sanksi yang dikenakan pada pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS)?
- 4) Apa saja kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.
- 2) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.
- 3) Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan pada pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS).

- 4) Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS).

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan dan pengembangan materi yang diperoleh dari perkuliahan yang dapat menambah serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang keuangan.

2. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan kelancaran pada pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS).

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis mengenai analisis prosedur pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan antara lain sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini peneliti menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian terkait.

3. BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti membuat desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menjabarkan mengenai gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian menjelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description*, dan profil usaha. Pada sub bab hasil penelitian akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan, penganan sanksi yang berlaku, dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS). Pada pembahasan akan memuat pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan, sanksi, dan kendala pada Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS).

5. BAB 5 PENUTUP

Bab ini peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian. Kesimpulan berupa uraian dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran penelitian ditujukan pada peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik dan perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.